



Perspektif *Independent Woman* dalam Menegosiasikan Kesetaraan Pernikahan: Analisis Hegemoni Maskulinitas di Kelurahan Gondangdia Jakarta Pusat

Almira Aulia Azzahra*, Refti Handini Listyani

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*almira.21072@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The rise of women's independence, or the phenomenon of the Independent Woman in various contexts, such as education, finances, and self-control, has created new expectations for partners and marriage. This study contributes to social and gender studies with the aim of subjectively analyzing how independent women negotiate forms of equality in marriage, examined from several aspects, including education, finances, decision-making, domestic roles, and emotional support. This study uses qualitative methods with a phenomenological approach and R.W. Connell's theory of masculine hegemony as an analytical tool. Subjects were determined using purposive sampling and snowball sampling techniques involving single and married women. The results show that there are differences in negotiation experiences based on the actual and prospective practices of independent women. These findings also confirm that independent women do not passively accept the hegemony of masculinity that still prevails in the realm of marriage, but rather apply it more flexibly according to their individual lives. By comparing the experiences of single and married independent women, which have rarely been studied empirically, this study is expected to reflect on the importance of real husband-wife partnerships in reducing the likelihood of inequality.

Keywords: *Independent Woman; Egalitarian; Marriage; Hegemonic Masculinity*

Abstrak

Meningkatnya kemandirian wanita atau fenomena *Independent Woman* dalam berbagai kondisi, seperti pendidikan, finansial, hingga kontrol diri, menciptakan ekspektasi baru terhadap pasangan dan pernikahan. Penelitian ini berkontribusi pada kajian sosial dan gender dengan tujuan menganalisis secara subjektif bagaimana wanita mandiri menegosiasikan bentuk kesetaraan dalam pernikahan yang dikaji dari beberapa aspek, meliputi pendidikan, finansial, pengambilan keputusan, peran domestik, dan dukungan emosional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teori hegemoni maskulinitas R.W. Connell sebagai pisau analisis. Penentuan subjek dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* yang melibatkan wanita lajang serta menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pengalaman negosiasi yang didasari pada praktik nyata dan prospektif wanita mandiri. Temuan ini juga menegaskan bahwa wanita mandiri tidak menerima hegemoni maskulinitas yang masih berlaku dalam ranah pernikahan secara pasif, melainkan diterapkan dengan lebih fleksibel sesuai kehidupan masing-masing. Dengan membandingkan pengalaman wanita mandiri lajang dan menikah yang masih jarang dikaji secara empiris, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi terhadap pentingnya kemitraan suami istri secara nyata untuk memperkecil peluang terjadinya kesenjangan

Kata Kunci: *Wanita Mandiri; Egaliter; Pernikahan; Hegemoni Maskulinitas*

Pendahuluan

Hegemoni maskulinitas merupakan gambaran realitas budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat. Konsep milik R.W. Connell ini menjelaskan bagaimana laki-laki diposisikan sebagai pelaku dominan yang sering dikaitkan dengan sifat maskulin, seperti tegas, kuat, dan rasional (Abdillah et al., 2025). Adanya ekspektasi terhadap cara laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminim) memainkan peran dalam ruang publik, semakin memperluas ketimpangan gender dan melanggengkan konstruksi sosial yang telah terbentuk.

Menurut R.W. Connell, hegemoni maskulinitas terlahir dari nilai serta norma sehingga tidak terbatas pada ciri fisik maupun perilaku, melainkan pada praktik sosial yang menciptakan standar laki-laki ideal dan semakin memperkuat dominasi (Listyani et al., 2024). Korban dari hegemoni ini bukan hanya perempuan, namun laki-laki juga merupakan korban sekaligus subjek yang dituntut untuk selalu tampil sempurna dengan menjadi lebih tinggi dari perempuan (Abdillah et al., 2025). Pola ini tidak hanya mengikat laki-laki sebagai individu, melainkan berlanjut hingga laki-laki berperan sebagai pasangan dalam sebuah pernikahan.

Setiap individu akan memiliki pandangan yang beragam dalam memaknai pernikahan. Beberapa menganggap bahwa menikah merupakan sebuah keharusan dan sisanya beranggapan bahwa menikah adalah pilihan hidup yang mungkin terjadi apabila telah mengumpulkan bekal yang memadai. Namun fenomena menikah sebagai pilihan hidup kian menjadi populer, terutama di kalangan wanita. Kesadaran akan pentingnya pendidikan pada wanita menyebabkan terjadinya pergeseran pola pikir, khususnya dalam menolak tuntutan sosial yang memandang bahwa wanita hanya perlu mahir saat menjalankan peran domestik (Repi & Maliombo, 2022).

Berbagai kemajuan pola pikir pada wanita memicu hadirnya keinginan untuk menjadi mandiri, baik secara keuangan, pengendalian emosi, dan pengambilan keputusan (Nihayah, 2024). Fenomena kemandirian wanita ini akrab disebut dengan istilah *Independent Woman* atau Wanita Mandiri dalam Bahasa Indonesia. Salah satu indikasi yang memperkuat adanya peningkatan fenomena wanita mandiri adalah menurunnya angka pernikahan di Indonesia, dan Jakarta menjadi salah satu kota yang mengalami fenomena tersebut selama beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan signifikan pada angka pernikahan di Jakarta sejak tahun 2020. Tercatat pada tahun 2020, angka pernikahan masih terbilang tinggi yang mencapai 50.776. Diikuti pada tahun 2021 dan 2022, jumlah mengalami penurunan sebanyak 3.000 sehingga menjadi 47.724 dan 47.225. Di dua tahun berikutnya, angka ini masih mengalami penurunan. Tahun 2023, jumlahnya hanya mencapai 43.363. Dan di tahun 2024, menunjukkan angka terakhir hanya 40.458. Fenomena kemerosotan angka pernikahan setiap tahun ini, sejalan dengan meningkatnya kesadaran wanita untuk menikah bukan karena tuntutan sosial.

Mayoritas wanita mandiri bahkan memilih untuk menunda pernikahan karena beberapa faktor, seperti fokus mencapai karier, keinginan untuk meneruskan pendidikan, kondisi ekonomi dan mental yang belum stabil, ketidaksiapan untuk menjalin hubungan, dan belum mendapatkan pasangan yang sesuai (Raihana & Abdullah, 2024). Dari beberapa lokasi yang ada di Jakarta, Jakarta Pusat tepatnya di Kelurahan Gondangdia, menjadi target peneliti setelah melalui observasi dan pra wawancara dengan beberapa wanita mandiri berusia produktif kerja dengan status masih lajang maupun sudah menikah.

Berdasarkan observasi dan informasi yang didapat, tergolong masif jumlah perempuan yang bekerja jika dibandingkan dengan laki-laki. Fenomena ini dapat dijumpai dalam berbagai kegiatan sehari-hari, seperti dalam transportasi umum, tempat

makan, hingga pedestrian di trotoar, mayoritas dipadati oleh perempuan. Dari hasil wawancara, didapati bahwa perempuan di Kelurahan Gondangdia mendambakan kesetaraan dengan pasangan, terutama dalam segi karier dan finansial. Keinginan ini salah satunya didasari dari harapan agar tidak terjadi kesenjangan ketika membangun rumah tangga. Dalam pandangan mayoritas masyarakat tradisional, menikah dan berumah tangga sering kali dianggap sebagai tujuan akhir dalam menjalani kehidupan, khususnya bagi perempuan. Pelabelan seperti “Perawan Tua” atau “Tidak Laku” akan melekat pada perempuan yang masih melajang di usia yang dianggap ideal untuk menikah oleh masyarakat (Anisya, Heniyati & Kamalia, 2024). Wanita yang beralih untuk fokus meningkatkan pendidikan, berkarier, maupun aktif di berbagai komunitas, justru dianggap menyimpang dari peran gender.

Sebaliknya, laki-laki akan dilabeli mapan dan sempurna apabila mampu mengerjakan perkara yang dipandang “kurang wajar” jika dikerjakan oleh perempuan. Kesenjangan ini menyadarkan perempuan untuk membuktikan potensi dan menjadi wanita yang mandiri, namun secara bersamaan menciptakan keputusan untuk menunda pernikahan. Ketakutan perempuan terhadap pernikahan masih erat kaitannya dengan pemikiran yang hingga kini dipertahankan bahwa laki-laki merupakan penguasa rumah tangga dan pemegang otoritas.

Hal ini secara tersirat mengandung makna bahwa perempuan sebagai istri harus tunduk dan mengikuti segala keputusan suami (Ampa, 2011). Berlangsungnya dominasi laki-laki dalam rumah tangga dapat mengekang kemandirian perempuan apabila tidak ada komunikasi mengenai batasan secara jelas. Pada pernikahan modern, perempuan cenderung mengharapkan sebuah kesetaraan dalam menjalani rumah tangga (Puspitaningrum & Philia, 2025). Kesetaraan yang dimaksud bukan sebatas pasangan dengan kondisi ekonomi mapan, melainkan mengenai kenyamanan emosional, kebebasan diri untuk tetap bekerja, hingga kerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dapat memengaruhi minat perempuan terhadap laki-laki.

Berdasarkan penelitian Solichin (2025) pernikahan yang berhasil dapat direalisasikan apabila ada upaya mendekonstruksi struktur patriarki dan menciptakan kemitraan yang setara tanpa memandang usia. Kesetaraan dapat diperoleh melalui bentuk negosiasi perempuan dalam menghadapi tantangan normatif, tidak hanya setara secara simbolik namun juga substantif. Peran gender dapat menjadi wujud substantif dari tercapainya kesetaraan pernikahan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Puspitaningrum & Philia (2025) dan Neang et al., (2025) yang menekankan kesetaraan pada pembagian peran secara rata dan fleksibel dengan pasangan sebagai cerminan adaptasi nilai sosial modern.

Selain itu menurut Nasirudin & Multazam (2025) wanita mandiri dapat mencapai keseimbangan hubungan dengan saling mengerti dan menghormati peran masing-masing. Banyak penelitian yang membahas persepsi wanita mandiri atau wanita karier terkait kesetaraan pernikahan dari segi pembagian peran, pengambilan keputusan, hingga finansial. Riset tersebut menunjukkan adanya pergeseran relasi yang egaliter dengan pasangan. Namun, sebagian besar masih berfokus pada persepsi dan belum banyak meneliti tentang bagaimana kesetaraan tersebut dinegosiasikan dalam praktik nyata melalui kompromi dan pengelolaan relasi kuasa dalam pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman subjektif wanita mandiri dalam menegosiasikan kesetaraan pernikahan, baik secara simbolik maupun substantif yang dianalisis dengan kerangka hegemoni maskulinitas. Dengan melibatkan wanita mandiri lajang serta menikah untuk membandingkan pengalaman secara prospektif dan praktik nyata, penelitian ini diharapkan dapat menjadi temuan terhadap pentingnya upaya kompromi dalam pernikahan untuk mencapai kesetaraan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan ditunjang dengan teori Hegemoni Maskulinitas milik R. W. Connell yang berlokasi di Kelurahan Gondangdia, Jakarta Pusat. Pemilihan subjek pada penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Delapan informan dilibatkan dengan perbandingan rata empat orang berdasarkan status kawin yang memenuhi kriteria, yakni berada pada usia produktif kerja dengan rentang 21-55 tahun. Penentuan informan berdasarkan status kawin adalah untuk membandingkan pengalaman wanita mandiri yang lajang dan menikah. Teknik pengumpulan data utama melalui wawancara mendalam untuk menggali pengalaman wanita mandiri, baik secara aktual maupun harapan dan konstruksi nilai. Proses wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar mendapatkan data yang sesuai tanpa bersifat kaku dan diberhentikan pada delapan orang sebab data tidak lagi menunjukkan adanya informasi substantif baru. Peneliti juga melakukan observasi non-partisipan serta dokumentasi guna mengamati dinamika dan interaksi sosial yang dilakukan para wanita mandiri dengan rekan kerja. Perolehan data dianalisis menggunakan teknik analisis data milik Miles dan Huberman yang dimulai dari reduksi data dengan membaca transkrip wawancara secara berulang dari setiap pernyataan informan, penyajian data dikelompokkan berdasarkan kategori yang telah diidentifikasi berdasarkan konsep hegemoni maskulinitas, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali bagaimana pengalaman subjektif wanita mandiri dalam menegosiasikan kesetaraan pernikahan yang dianalisis menggunakan teori hegemoni maskulinitas. Teori hegemoni maskulinitas menjelaskan bagaimana bentuk dominasi laki-laki sebagai maskulin ideal masih dipertahankan dan berdampak pada posisi perempuan sebagai kaum subordinat. Teori ini akan dijadikan pisau analisis sebagai bentuk kompromi wanita mandiri dalam mewujudkan kesetaraan pernikahan. Selain itu, teori dalam penelitian ini juga berperan untuk menavigasi harapan dan praktik nyata keberadaan wanita mandiri sebagai istri dalam konteks kesetaraan dengan pasangan. Dengan melibatkan delapan informan lajang dan menikah yang aktif bekerja di Kelurahan Gondangdia, diharapkan penelitian ini dapat membantu membuka sudut pandang dari kacamata wanita mandiri dalam menegosiasikan kesetaraan pernikahan yang dilihat dari beberapa aspek di tengah angka pernikahan yang kian menurun.

Tabel 1. Data Delapan Informan Wanita Mandiri

Nama	Usia	Pekerjaan	Status
DN	25	<i>Front Office</i>	Lajang
SL	23	<i>Sales Admin</i>	Lajang
DA	24	<i>Marketing Communication</i>	Lajang
FK	26	<i>Marketing Communication</i>	Lajang
WT	40	<i>Housekeeping Supervisor</i>	Menikah
YV	34	<i>Sales Executive</i>	Menikah
DB	34	<i>Sales</i>	Menikah
EV	51	HRD	Menikah

Sumber: Data Primer, 2025

Kata kesetaraan pada penelitian ini akan dibahas dari beberapa aspek yang dapat menjadi penting dalam sebuah pernikahan, meliputi kesetaraan pendidikan, finansial, pengambilan keputusan, peran domestik, serta dukungan emosional. Dalam teori hegemoni maskulinitas, laki-laki yang menjadi figur maskulin ideal sering kali dikaitkan dengan norma-norma tidak tertulis berupa kekuatan fisik, ketahanan emosional, dan juga

kemandirian. Standar demikian telah diajarkan kepada laki-laki secara tidak langsung melalui keluarga, institusi pendidikan, hingga lingkungan sosial. Adanya keinginan untuk dianggap sebagai sosok maskulin ideal menurut masyarakat, menimbulkan dorongan yang bersifat tuntutan dan mengharuskan laki-laki agar mampu memenuhi standar tersebut (Abdillah et al., 2025).

Norma mengenai maskulin ideal juga berlangsung dalam lingkup rumah tangga dan keluarga. Laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah yang wajib bekerja, sedangkan perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja. Peran perempuan hanya sebatas mengurus rumah, anak, dan tugas domestik lainnya yang dianggap bukan menjadi ranah laki-laki sebagai pemimpin. Oleh karena itu, selain ingin menganalisis perspektif wanita mandiri dalam menegosiasikan kesetaraan pernikahan, penelitian ini diharapkan dapat mengupas batasan dari istilah setara apabila diterapkan dalam konteks pernikahan yang ditinjau dengan teori hegemoni maskulinitas R. W. Connell.

1. Setara dalam Pernikahan

Istilah "setara" memiliki konotasi bahwa sesuatu bersifat sama rata dan adil. Jika dilihat dari perspektif gender, setara meliputi kesamaan dalam mendapat hak dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Sayangnya, nilai ini kurang populer di beberapa kalangan masyarakat dan sebaliknya, justru mempertahankan nilai yang menempatkan laki-laki sebagai kaum superior. Namun dalam pernikahan, hal ini perlahan dapat memudar apabila perempuan mampu menegosiasikan hegemonisasi tersebut. Karena jika pernikahan tidak dilandasi dengan kesetaraan, maka mayoritas tidak berjalan dengan semestinya yang disebabkan oleh ketimpangan antara dua pihak.

Ketimpangan dapat menjadi akar dari permasalahan, baik masalah internal maupun eksternal yang berasal dari keluarga atau lingkungan (Mukhtaramin, Khairuddin & Sitorus, 2023). Salah satu informan yang masih lajang berinisial DN berpendapat bahwa kesetaraan terletak pada bagaimana cara berpikir (Wawancara, 13 Oktober 2025). Informan DN merasa kecocokan pemikiran menjadi kunci dari hubungan pernikahan yang harmonis. Sebaliknya, cara berpikir yang tidak sejalan dapat menimbulkan masalah sebab menjadi pemicu dari perdebatan. Informan FK yang juga wanita lajang mengutamakan hubungan saling mendukung dan kemauan untuk tumbuh bersama (Wawancara, 13 Oktober 2025). Dengan menjalani proses tumbuh bersama, maka akan lahir hubungan yang saling menghargai menurut FK.

Informan YV, salah satu wanita menikah, mengutamakan kesesuaian visi misi dan memiliki arah yang sejalan dengan pasangan sebagai bentuk kesetaraan (Wawancara, 13 Oktober 2025). Menurutnya, kesamaan arah dan tujuan dapat meminimalisir frekuensi terjadinya perbedaan pendapat. Menurut DB sebagai wanita yang menikah, kesetaraan dapat ditinjau melalui cara berkomunikasi, mampu memahami kondisi pasangan dalam keadaan baik maupun buruk, tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, dan mampu mendukung impian pasangan (Wawancara, 13 Oktober 2025). Berdasarkan hasil wawancara, terdapat berbagai variasi jawaban ketika wanita mandiri mendefinisikan kata "setara" dalam pernikahan. Namun, dapat disimpulkan bahwa mayoritas informan menginginkan dirinya untuk tetap berdaya. Keinginan ini kemudian direfleksikan melalui harapan untuk didukung, dihargai, dan diimbangi dari cara berpikir sebagai bentuk kesetaraan.

2. Pendidikan

Kesadaran mengenai pentingnya pendidikan telah mengalami transisi, terutama pada perempuan. Keinginan untuk berkontribusi dan menjadi setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang, menjadikan perempuan lebih selektif ketika memilih pasangan.

Pada realitasnya, perempuan dengan pendidikan tinggi akan memprioritaskan laki-laki yang minimal memiliki kesamaan latar pendidikan dengan dirinya (Khulaifah et al., 2023). Menurut DN sebagai wanita lajang, kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan menjadi penting, terutama untuk mencegah terjadinya konflik seperti rasa minder yang dapat berujung pada perselingkuhan.

DN menganggap pendidikan yang setara dengan pasangan dapat menjadi penghalang terhadap terjadinya konflik dalam pernikahan (Wawancara, 13 Oktober 2025). DN juga memiliki kekhawatiran berupa “ada yang minder.” Ungkapan ini masih lekat dengan salah satu hasil konstruksi sosial masyarakat bahwa laki-laki akan merasa minder jika perempuan memiliki pendidikan yang lebih tinggi darinya (Putri et al., 2020). Rasa minder dapat menumbuhkan asumsi pada laki-laki bahwa dirinya akan kalah dan tidak lagi dihargai sebagai pasangan sehingga berujung mendua guna memperoleh rasa aman dan nyaman dari pihak ketiga.

Namun, informan DN menyatakan bahwa laki-laki yang memiliki pendidikan lebih rendah darinya tidak akan bermasalah, selama hubungan terjalin dengan baik dan tergantung pada personalitas pasangan (Wawancara, 13 Oktober 2025). Begitu juga dengan informan FK yang tidak menganggap perbedaan pendidikan sebagai sebuah masalah, tetapi menitikberatkan pada kesiapan mental dan bagaimana cara menjalani kehidupan (Wawancara, 13 Oktober 2025). Terdapat bentuk negosiasi bahwa DN dan FK lebih mengutamakan personalitas pasangan, meskipun latar belakang pendidikan berbeda.

Penekanan pada personalitas juga merefleksikan karakteristik maskulin ideal seperti kedewasaan. Informan EV dan DB selaku wanita menikah, menyatakan bahwa pasangan dengan pendidikan setara menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan ketika menikah karena berkaitan dengan pola pikir (Wawancara, 13 Oktober 2025). Ada kekhawatiran mengenai kesenjangan tingkat pendidikan dapat memengaruhi kesenjangan dalam berpikir, sebab pendidikan dapat berdampak pada bagaimana seseorang berpikir dan bertindak. Keduanya juga menegosiasikan kesetaraan dengan tidak mengharuskan laki-laki untuk memiliki pendidikan lebih tinggi, namun memandang pendidikan yang setara antara suami dan istri tetap penting.

Berdasarkan pernyataan EV dan DB, terdapat pemaknaan pendidikan sebagai representasi pola pikir. Meskipun tidak menuntut laki-laki berpendidikan lebih tinggi, namun pola pikir merefleksikan rasionalitas yang merupakan modal simbolik dalam figur maskulin. Para informan wanita mandiri menegosiasikan kesetaraan dalam aspek pendidikan dengan tidak menekankan pada standar formal pendidikan, namun tetap mengutamakan rasionalitas dan kedewasaan laki-laki. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki berhak mendapat kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan dan belajar karena dalam pernikahan dibutuhkan keselarasan pola pikir guna meminimalisir terjadinya konflik (Vikram, 2024).

3. Finansial

Terbukanya kesempatan yang lebih luas bagi laki-laki dibandingkan perempuan di dunia kerja, mencerminkan ruang yang terbatas untuk perempuan berkarir. Hal ini tidak hanya direalisasikan melalui sempitnya peluang kerja bagi perempuan, namun menjadi bukti nyata adanya kesenjangan gender di tempat kerja. Perempuan sering kali mengalami perlakuan tidak adil, seperti perbedaan upah, pembatasan jabatan tertentu, hingga segregasi pekerjaan (Sartika et al., 2025). Laki-laki dipandang lebih layak untuk menempati posisi sebagai pemimpin dan menerima upah yang lebih tinggi. Dalam hegemoni maskulinitas, penerapan maskulin ideal dapat diwujudkan laki-laki melalui kemandirian dan pencapaian. Pada pernikahan, bentuk kemandirian diwujudkan melalui

peran laki-laki sebagai satu-satunya pihak yang bekerja, sementara istri berada di rumah (Abdillah et al., 2025). Informan FK sebagai wanita lajang memiliki keinginan untuk mendapatkan pasangan yang memiliki kondisi finansial minimal setara dengan dirinya, namun lebih mengharapkan laki-laki dengan finansial di atas FK (Wawancara, 13 Oktober 2025).

Ada perasaan menyayangkan apabila FK memiliki pendapatan lebih tinggi dari pasangan, sedangkan pasangannya belum maksimal dalam melaksanakan perannya sebagai pencari nafkah (Solichin, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya bentuk implementasi peran tradisional laki-laki yang juga dianggap sebagai realisasi maskulin ideal menurut teori hegemoni maskulinitas (Abdillah et al., 2025). Terdapat sedikit perbedaan mengenai pernyataan DA dengan FK. Informan DA yang juga wanita lajang, memberikan pernyataan bahwa laki-laki tetap harus memiliki usaha untuk berkembang apabila belum mencapai kondisi finansial setara atau di atas pasangan (Wawancara, 13 Oktober 2025).

Pernyataan ini menegaskan selama laki-laki tidak statis dan memiliki kemauan untuk mengubah keadaan finansialnya, maka dapat dengan mudah direalisasikan. DA masih menegosiasikan dengan tidak memaksa kesetaraan finansial secara instan, namun tetap mengharapkan kesadaran laki-laki untuk menyamai hal tersebut. Informan berinisial DB dan YV sebagai wanita menikah, merasa bahwa bukan sebuah tantangan apabila istri bekerja dan memiliki pendapatan lebih tinggi dari suami, dengan catatan suami mengizinkan dan tidak mempermasalahkan (Wawancara, 13 Oktober 2025).

DB dan YV tidak merasa ada yang salah jika istri mendapat penghasilan dan jabatan tinggi di tempat kerja, selama tidak berujung merendahkan suami dan melupakan “kodrat” istri yakni posisinya “di bawah suami”. Penggunaan istilah “kodrat” dan “di bawah suami” menunjukkan adanya penerimaan ideologi patriarki secara halus oleh wanita menikah, meskipun memiliki kemandirian ekonomi. Bentuk negosiasi wanita menikah direalisasikan melalui partisipasi mereka secara ekonomi, namun tetap memposisikan laki-laki sebagai figur pemimpin dalam rumah tangga. Perbedaan antara wanita mandiri lajang dan menikah, berada pada cara menegosiasikan perbedaan finansial dengan pasangan.

Wanita lajang tampak masih menginternalisasi hegemoni maskulinitas yang mengharapkan laki-laki memiliki kondisi finansial minimal setara atau bahkan lebih tinggi, namun dinegosiasi dengan memberikan ruang kepada laki-laki untuk meningkatkan kualitas finansial. Wanita menikah lebih fleksibel dan melihat bagaimana cara menempatkan diri sebagai istri yang bekerja. Ada tindakan negosiasi kesetaraan sekaligus hegemoni maskulinitas pada informan sudah menikah dengan tidak mengharuskan suami menjadi pihak yang memperoleh penghasilan lebih besar, melainkan mengarah pada bentuk kerja sama pasangan serta saling mendukung satu sama lain (Maulana, 2023).

4. Pengambilan Keputusan

Secara normatif, ranah peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga terikat dengan sifat maskulin dan juga feminim. Laki-laki dianggap tepat dengan posisi pemimpin, sedangkan perempuan identik sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus segala pekerjaan rumah. Dalam hegemoni maskulinitas, salah satu bentuk maskulin ideal digambarkan dengan kekuasaan dan pemegang otoritas. Selain di ranah politik dan publik, pola kekuasaan juga terjadi pada lingkup rumah tangga. Praktik laki-laki sebagai pemegang kekuasaan terlihat ketika menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga, salah satunya dalam proses pengambilan keputusan.

Suami dianggap sebagai pengambil keputusan utama, namun kondisi ini sering kali menjadikan istri tidak memperoleh kesempatan untuk mengutarakan pendapat (Firdaussia, 2022). Menurut pernyataan informan SL dan DN selaku wanita lajang, keduanya kelak tetap mempertahankan posisi suami sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga. Namun terdapat pengecualian yang mengharuskan suami agar mendiskusikan permasalahan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan (Wawancara, 13 Oktober 2025).

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran peran tradisional suami dan istri yang tidak hanya menempatkan istri sebagai kaum subordinat, tetapi menjadikan istri sebagai mitra untuk bekerja sama. Pendapat serupa disampaikan oleh informan YV dan WT selaku wanita menikah. Informan YV berpendapat bahwa suami sebagai pengambil keputusan utama karena memang perannya adalah kepala rumah tangga, namun setelah melalui diskusi terlebih dahulu (Wawancara, 13 Oktober 2025). Sedangkan informan WT menyatakan bahwa suami tetap pengambil keputusan utama, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi WT untuk turut mengambil keputusan tergantung pada keadaan yang dialami (Wawancara, 13 Oktober 2025).

WT dapat berperan sebagai pengambil keputusan apabila dirasa mampu mengatasi masalah tertentu, namun tetap memberikan info kepada suami terkait masalah dan juga keputusan yang diambilnya. Tindakan WT dalam memberikan keterangan pada suami mengenai bentuk masalah dan keputusan yang diambil merupakan bentuk simbolik dari peran laki-laki sebagai pengambil keputusan sekaligus pemimpin. Delapan informan merasa bahwa suami tetap merupakan pengambil keputusan utama dalam rumah tangga dan bertanggung jawab akan keputusan yang diambil.

Dengan catatan bahwa suami harus mendiskusikan terlebih dahulu dengan istri sebelum mengambil keputusan dan istri hanya bertugas untuk mendukung keputusan suami. Para informan menginternalisasi adanya hegemoni maskulinitas yang memposisikan suami sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga. Namun terdapat bentuk negosiasi kesetaraan peran yang menempatkan istri sebagai mitra dengan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan (Putri & Lestari, 2015). Meskipun secara simbolik posisi suami sebagai pengambil keputusan utama tidak terelakkan, namun adanya diskusi antara suami dan istri dapat menjadi perwujudan substantif dari hubungan egaliter (Rahmawati & Afrizal, 2023).

5. Peran Domestik

Stereotip gender tradisional menciptakan budaya patriarki yang memposisikan laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam ruang publik, politik, hingga rumah tangga. Tugas laki-laki sebagai suami dan kepala rumah tangga sering dikaitkan hanya sebatas pemimpin, pencari nafkah, dan pemilik otoritas terhadap istri. Perempuan sebagai istri mendapatkan peran untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah, termasuk tugas domestik seperti mencuci, memasak, dan mengurus anak (Abdillah et al., 2025).

Pembagian ini dianggap menjadi porsi peran ideal dalam berumah tangga. Internalisasi pola pembagian peran ini menjadikan laki-laki pantang untuk membantu istri dalam melakukan pekerjaan rumah, bahkan kerap diyakini sebagai hal yang kurang wajar karena bukan termasuk ranah yang ideal untuk laki-laki (Rofi'ah, 2015). Informan SL selaku wanita lajang menyampaikan bahwa pembagian tugas dalam melakukan pekerjaan rumah adalah rata antara suami dengan istri. Karena menurutnya, kodrat perempuan hanya melahirkan, menyusui, dan menstruasi (Wawancara, 13 Oktober 2025).

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Pricillia (2021) dan merupakan bentuk penolakan bahwa mengurus rumah bukanlah “kodrat” atau peran bawaan perempuan,

melainkan hasil konstruksi yang dikaitkan dengan femininitas. Informan FK sebagai wanita lajang, turut memberikan jawaban yang sama. Menurutnya dalam melaksanakan pekerjaan rumah, perlu adanya kerja sama antara suami dan istri, terlebih lagi ketika telah memiliki anak (Wawancara, 13 Oktober 2025). Menurut EV selaku wanita menikah, laki-laki sebagai suami tidak perlu mengandalkan keberadaan istri untuk melakukan pekerjaan rumah.

Apabila suami mampu mengerjakannya secara mandiri, maka ada baiknya untuk tidak menunggu istri yang menyelesaikannya (Wawancara, 13 Oktober 2025). Ada kalanya istri turun tangan dalam pekerjaan rumah tangga, jika dirasa suami sedang terkendala untuk mengerjakannya. EV menyatakan perlu adanya bentuk saling pengertian antara suami dan istri sebagai bentuk kompromi dalam pembagian peran domestik (Damiri, 2023). WT yang juga wanita menikah, turut membagikan pengalaman bahwa dirinya dengan suami selalu mengerjakan pekerjaan rumah secara bersama. Adanya kesamaan latar belakang pekerjaan WT dengan suami membuat keduanya saling mengerti dan membantu satu sama lain (Wawancara, 13 Oktober 2025).

Seluruh informan wanita mandiri memiliki pandangan yang sama. Adanya keinginan agar pasangan ikut terlibat dalam mengerjakan tugas rumah tangga, seperti mencuci, menyapu, hingga mengurus anak. Karena menganggap bahwa tugas rumah tangga adalah bentuk kerja sama antara suami dan istri (Neang et al., 2025). Dalam bagian peran domestik, wanita mandiri menentang bentuk hegemoni maskulinitas dan lebih tegas dalam menghendaki kesetaraan substantif agar suami turut terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Keinginan tersebut tidak hanya sebatas pembagian tugas, namun juga upaya untuk meruntuhkan makna simbolik yang menetapkan tugas domestik sebagai tanggung jawab eksklusif perempuan.

6. Dukungan Emosional

Karakteristik maskulin ideal sering dikaitkan dengan ketahanan emosional. Laki-laki dengan sifat rentan dan ekspresif secara emosional dikategorikan sebagai sosok yang lemah atau dipandang kurang jantan (Abdillah et al., 2025). Ketika tampil di ruang publik, laki-laki dipenuhi ekspektasi untuk memerankan sosok yang agresif, tegas, dan tangguh. Stigma ini menjadikan laki-laki takut apabila dirinya menunjukkan sifat rentan dan sensitif. Kerentanan emosional dan sensitivitas lebih diterima jika terjadi pada perempuan karena dianggap sebagai salah satu wujud dari femininitas dan konstruksi peran gender berupa *emotional labor* atau kerja emosional.

Dampak dari hegemoni maskulinitas tidak hanya dirasakan oleh perempuan, melainkan juga laki-laki. Menurut DA selaku wanita lajang, bentuk dukungan emosional adalah ketika laki-laki dapat menjadi pendengar yang baik dan teman cerita yang solutif (Wawancara, 13 Oktober 2025). DA tidak menunjukkan adanya internalisasi hegemoni maskulinitas yang ketat dengan tidak mengizinkan laki-laki untuk menjadi lemah, namun tetap memposisikan laki-laki sebagai figur yang mampu mendengarkan dan memberikan solusi ketika dirinya mengalami masalah. Pernyataan ini merefleksikan bayangan wanita lajang terhadap relasi kuasa yang bersifat simbolik, dimana laki-laki yang menjadi penopang emosi. Ada kemiripan pernyataan antara FK dan DN yang juga wanita lajang. Keduanya mengharapkan laki-laki yang dapat menjadi “garda terdepan” sekaligus memihak istri apapun yang terjadi (Wawancara, 13 Oktober 2025). Kata “garda terdepan” menggambarkan bentuk konstruksi yang memposisikan laki-laki sebagai seseorang yang kuat dan mampu melindungi pasangannya. Adanya ekspektasi pada pasangan untuk menjadi pendengar yang baik dan selalu ada mencerminkan pengharapan agar laki-laki senantiasa hadir.

Berbeda dengan wanita lajang, pernyataan YV dan DB sebagai wanita menikah sejalan dengan penelitian Puspitaningrum & Philia (2025) yang mengutamakan keterbukaan untuk mengutarakan perasaan dari pasangan agar tercipta hubungan yang saling mengerti (Wawancara, 13 Oktober 2025). Keduanya mencerminkan adanya komunikasi dua arah antara suami dan istri. Menurut DB, ego suami terletak pada istri. Apabila istri mampu menjadi pasangan yang pengertian, maka suami akan mengikuti pola demikian meskipun memiliki ego yang tinggi (Wawancara, 13 Oktober 2025).

Hal ini menunjukkan adanya internalisasi peran *emotional labor* secara halus dan meletakkan perempuan sebagai pengendali hubungan karena identik dengan perannya sebagai istri dan ibu yang bersifat merawat. Wanita lajang membayangkan dukungan emosional dengan menyerahkan *emotional labor* sebagai kewajiban laki-laki agar mampu mengelola emosi pasangan dan menjadi protektor. Pada wanita menikah, mereka cenderung mengedepankan relasi timbal balik dengan saling mendengarkan keluhan masing-masing dan menganggap kunci emosional serta ego suami terletak pada cara istri bersikap pada suami (Nasirudin & Multazam, 2025).

Wanita menikah menjalankan peran *emotional labor* melalui penyesuaian sikap yang beriringan dengan kuasa emosional simbolik laki-laki untuk menjaga stabilitas hubungan. Dalam hal ini, informan lajang termasuk menginternalisasi bentuk hegemoni maskulinitas secara subtil dengan mendambakan figur laki-laki yang lebih pengertian. Sedangkan informan menikah, menegosiasikannya dengan menjadi pasangan yang saling pengertian.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan adanya keberagaman perspektif wanita mandiri dalam menegosiasi kesetaraan pernikahan. Para wanita mandiri mendambakan pernikahan yang didasari pada kerja sama, keselarasan berpikir, dan kesamaan visi misi. Keinginan untuk tetap bisa berdaya dan diposisikan sebagai mitra oleh suami, menjadi salah satu bentuk negosiasi mereka dalam mencapai kesetaraan. Apabila ditinjau dari beberapa aspek, seperti pendidikan, finansial, pengambilan keputusan, keterlibatan peran domestik, hingga bentuk dukungan emosional, maka terdapat sedikit perbedaan cara menyikapi antara informan yang masih lajang dan sudah menikah. Wanita mandiri lajang cenderung menunjukkan bentuk negosiasi bersifat prospektif yang berdasar pada konstruksi nilai, prinsip, serta harapan mengenai kesetaraan dan menetapkan ekspektasi lebih tajam terhadap peran laki-laki. Sementara itu, wanita menikah menegosiasi berdasarkan praktik nyata dalam pernikahan sehingga lebih adaptatif terhadap kesetaraan substantif dan simbolik. Hal ini menegaskan bahwa hegemoni maskulinitas masih berjalan dalam ranah pernikahan, namun tidak selamanya diterima secara kaku dan pasif. Wanita mandiri tidak sepenuhnya takluk pada norma masyarakat yang selalu memposisikan laki-laki sebagai pihak dominan, sebaliknya ada batasan dan tindakan kompromi sesuai penerapan pada kehidupan masing-masing.

Daftar Pustaka

- Abdillah, H., Ulhaq, I. S. F. A., Alfauzan, D. F. Z. S., Arzaqy, M. F., Yens, D., & Moh. F. M. (2025). *Membincang Hegemoni Maskulinitas*. Jakarta: Unusia Press.
- Ampa, A. T. (2011). Budaya Masyarakat dan Implikasinya Terhadap Keterlibatan Suami dalam Kegiatan Rumah Tangga. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 6(2), 103-113.
- Anisya, N., Heniyati, H., & Kamalia, E. R. (2024). Coping Strategi Perempuan Lajang Terhadap Stigma Perawan Tua. *Ijougs: Indonesia Journal of Gender Studies*, 4(2), 21-36.

- Damiri, D. (2023). Transformasi Gender dalam Keluarga Multikultural. *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 8(1), 33-42.
- Firdaussia, I. (2022). Pandangan Masyarakat Terhadap Istri Berpendidikan Lebih Tinggi dari Suami Perspektif Gender. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 6(2).
- Khulaifah, A., Mashuri, M. M., Rohtih, W. A., & Mufid, M. A. (2023). Urgensi Kesetaraan Pasangan Sekufu' dalam Al-Qur'an (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi). *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 1(2), 1-10.
- Listyani, R. H., Dhuha, M. S., Rosidah, E. D., & Sailurroqma, R. I. (2024). Hegemonic Masculinity in the Tradition of Women Proposing Marriage. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 8(2), 180-195.
- Maulana, L. F. (2023). Ayah Rumah Tangga: Evolusi Maskulinitas di Era Modern. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 3(2), 169-185.
- Mukhtaramin, A., Khairuddin, K., & Sitorus, I. R. (2023). Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari'ah. *QIYAS: Jurnal Hukum Islam & Peradilan*, 8(2), 294-305.
- Nasirudin, H., & Multazam, U. (2025). Dinamika Gender dalam Pernikahan: Reduksi Maskulinitas dan Keseimbangan Relasi Suami Istri. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 27-38.
- Neang, E. H. D., Bura, T., Mutmainnah, F. A., & Yuanti, A. (2025). Analisis Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Keluarga Modern Dalam Penerapan di Lingkungan Pasutri (Pengantin yang Menikah Mudah). *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 321-334.
- Nihayah, U. (2024). *Independent Woman: Kunci Kesuksesan Perempuan di Tengah Ketidakpastian*.
- Pricillia, W. R. R. (2021). *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah*. Yogyakarta: Odise Publishing.
- Puspitaningrum, P. A. E., & Philia, M. (2025). The Meaning of Marriage for Single Career Women in Urban Areas. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(4), 7840-7848.
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72-85.
- Putri, R. D., Fahadi, P. R., Kusumaningtyas, A. P., Utomo, A., & Sutopo, O. R. (2020). Navigating the Future Husband: Perempuan Muda, Negosiasi Pernikahan dan Perubahan Sosial. *Jurnal Studi Pemuda*, 9(2), 90-103.
- Rahmawati, Y., & Afrizal, S. (2023). Peran Gender Dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga Keluarga Pedesaan. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 9(2), 17-33.
- Raihana, S. N., & Abdullah, H. M. (2024). Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1).
- Repi, A. A., & Maliombo, N. E. (2022). Karir atau Hubungan, Manakah Pilihanku? Pengambilan Keputusan Menikah Pada Wanita Karir. *Psychopreneur Journal*, 6(2), 60-75.
- Rofi'ah, S. (2015). Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender. *Muwazah*, 7(2), 93-107.
- Sartika, R. D., Yahya, A. A., Susilo, G. P., & Nurdin, N. (2025). Kesenjangan Gender dalam Dunia Kerja dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Nasional. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 9(3), 61-70.

- Solichin, N. M. (2025). A Two-Sided Dilemma: Gender Construction and The Struggle For Equality In Early Marriage In Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 16(1), 54-66.
- Vikram, K. (2024). Modern Marriage in a Traditional Society: The Influence of College Education on Marriage in India. *Journal of Family Issues*, 45(5), 1116-1141.